

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI,
KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA**

NOTA DINAS

NOMOR : AK.03.01/348/SET.M.EKON.1/07/2026

Yth : Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan
Pariwisata
Hal : Penyampaian Narasi Capaian Kinerja Sekretaris Deputy Bidang
Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata TW I dan II Tahun
2026
Tanggal : 17 Juli 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Nomor AK.03.01/170/SET.M.EKON.1/06/2026 hal Permintaan Penyusunan Narasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan Laporan Capaian Kinerja (LAPKIN) Triwulan I dan II Tahun 2026 Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata pada Triwulan I dan II Tahun 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Industri, Ketenagakerjaan,
dan Pariwisata,



Nuryani Yunus
NIP 197009091996032001

Tembusan Yth.:
Plt. Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata (sebagai laporan)

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Triwulan I Tahun 2026

Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan I 2026	Realisasi Triwulan I 2026	Capaian (%)
I	Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Baik					
1.1	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	92 %	23 %	23 %	100 %
1.2	Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	100 %	25 %	25 %	100 %
1.3	Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	100 %	25 %	25 %	100 %
1.4	Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	100 %	25 %	25 %	100 %
1.5	Persentase Penyelesaian Isu-isu Strategis yang diberikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Persentase (%)	100 %	25 %	25 %	100 %
1.6	Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	75 %	25 %	25 %	100 %
1.7	Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	-	-	-

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Baik

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang baik ditunjukkan oleh pencapaian tujuh indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy;
6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 *Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata*

Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda nasional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani. Bagi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, keberhasilan implementasi reformasi birokrasi menjadi instrumen penting dalam mendukung tercapainya sasaran strategis, khususnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Tingkat implementasi reformasi birokrasi diukur melalui pemenuhan dokumen pendukung reformasi birokrasi yang sesuai standar, yang mencakup aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2026 ditetapkan sebesar **92%**. Pengukuran dilakukan dengan menilai kelengkapan dan kualitas dokumen pendukung, ketepatan waktu penyampaian, serta kesesuaian dengan format standar dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah terealisasi sebesar 23% dari target sebesar 23% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy	Persentase (%)	23%	23%	100 %

Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata				
---	--	--	--	--

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Mengkoordinasikan penyusunan cascading IKU Deputy ke unit kerja Eselon II	Terlaksana	Dokumen PK, Manual IKU, dan Rencana Aksi telah ditandatangani oleh seluruh pimpinan unit kerja di Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada 11 Maret 2026
2.	Mendukung Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB General dan Tematik	Tertunda	Pemenuhan bukti dukung Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik belum dapat dilaksanakan karena sampai dengan Triwulan I tahun 2026 belum terdapat penetapan tema RB General sebagai acuan pelaksanaan. Kegiatan akan dilaksanakan setelah kebijakan dan tema RB General ditetapkan.

		3.	Melakukan monitoring dan Evaluasi Implementasi Renaksi agen perubahan tahun 2025	Terlaksana	Fasilitasi evaluasi rencana tindak Agen Perubahan dilaksanakan melalui serangkaian rapat koordinasi intensif bersama seluruh unit kerja di lingkungan Deputy V. Kegiatan ini difokuskan untuk mengidentifikasi kendala implementasi di lapangan serta merumuskan solusi atas hambatan yang ditemukan. Hasil evaluasi tersebut menjadi basis dalam menyempurnakan langkah tindak lanjut, sehingga setiap inisiatif perubahan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi perubahan memberikan dampak nyata bagi kinerja organisasi.
		4.	Menyusun Tim kerja untuk mendukung IKU Sekretaris Deputy	Terlaksana	Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor: 5 Tahun 2026 tentang Kelompok Kerja Dukungan Teknis dan Administrasi Penyusunan Perencanaan, Pelaporan Program dan Anggaran, Monitoring Penyelesaian Isu Strategis dan Implementasi Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Tahun 2026 Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor: 6 Tahun 2026 tentang Kelompok Kerja Dukungan Teknis dan Administrasi Koordinasi Implementasi Tata Kelola, Pembangunan Zona Integritas, dan Peningkatan Kepuasan Layanan pada Sekretariat Deputy Bidang

			Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Tahun 2026
	5.	Penyusunan Renja Tahun 2026	Terlaksana Telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Perjanjian Kinerja Deputy V pada 15 Januari 2026 berdasarkan UND Nomor: AK.01.02/22/D.V.M.EKON.1/01/2026
	6.	Penyusunan matriks manajemen risiko	Terlaksana Telah diselenggarakan pelatihan manajemen risiko pada tanggal 10 s.d 13 Maret 2026 Telah diselenggarakan workshop penyusunan matriks manajemen risiko pada tanggal 13 Maret 2026
	7.	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Terlaksana Pada Triwulan I tahun 2026, Pemanfaatan Aplikasi Srikandi di lingkungan Deputy V telah dioptimalkan untuk Mempercepat Proses Korespondensi antar Instansi serta Memperkuat Tata Kelola Digitalisasi Arsip yang Lebih Sistematis dan Akuntabel. Penyampaian Nota Dinas Nomor: TU.04/73/D.V.EKON.1/02/2026 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Keaktifan User Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	8.	Pelaksanaan pencatatan SIRUP	Terlaksana Deputy V secara Konsisten Melakukan Pencatatan SIRUP Sebagai Bagian dari Pengawasan Internal terhadap Kualitas Perencanaan Pengadaan. Melalui Evaluasi ini, setiap ketidaksesuaian Data dapat Segera diperbaiki Sehingga Proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Deputy

			V Berjalan Lebih Akuntabel, Meminimalisir Revisi Anggaran, dan Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Sebagai Bentuk Kepatuhan terhadap Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Deputi V telah melaksanakan Pemutakhiran Data pada Aplikasi SIRUP. Pengisian ini Mencakup Sinkronisasi antara DIPA dengan Rencana Paket Pekerjaan, yang Bertujuan untuk Menjamin Ketersediaan Informasi Rencana Pengadaan yang Terbuka bagi Penyedia dan Masyarakat Luas, guna Mendukung Efektivitas Tusi Deputi V.
9.	Optimalisasi Pemanfaatan aplikasi e-kinerja BKN	Terlaksana	Telah dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-kinerja BKN

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Meskipun target kuantitatif TW I tercapai 23%, terdapat tantangan dalam menyelaraskan timeline penetapan dokumen target kinerja (seperti cascading IKU dan matriks manajemen risiko yang baru rampung pertengahan Maret).
2. Berdasarkan hasil evaluasi keaktifan, masih rendahnya pemahaman dan keaktifan pegawai di lingkungan Deputi V dalam memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dan e-Kinerja BKN secara optimal.
3. Efisiensi anggaran di satu sisi dapat menghemat penggunaan anggaran secara signifikan namun disisi lain juga berakibat pada perubahan secara masif atas rencana kegiatan yang sudah disusun sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran. Akibatnya, unit kerja perlu menyesuaikan rencana kegiatan beserta kebutuhan anggarannya.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026,

	upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pengendalian berkala akan dilakukan setiap bulan untuk memastikan operasionalisasi rencana aksi triwulanan tidak mengalami <i>time-lag</i> akibat pergeseran jadwal administratif, sehingga implementasi di lapangan tetap berjalan sinkron. 2. Guna mengatasi rendahnya pemahaman dan keaktifan pegawai, akan dilakukan monitoring keaktifan user aplikasi SRIKANDI. 3. Unit kerja Eselon II didorong untuk melakukan simplifikasi metode pelaksanaan kegiatan (misalnya mengoptimalkan format hybrid atau kolaborasi lintas unit).
--	--

1.2 <i>Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata</i>	Latar Belakang Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nilai keberhasilan Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan dan kemudian dikalikan 100%. Hasil Pengukuran Kinerja Target kinerja Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Implementasi tata kelola diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan tata kelola di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi tata kelola yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu. Pada Triwulan I Tahun 2026, Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah
--	---

teralisasi sebesar 25% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	25%	25%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Menyusun Perencanaan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Terlaksana	- Telah disusun Laporan Hasil Rapat Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 melalui nota dinas nomor AK.01/09/D.V.M.E KON.1/01/2026 tanggal 9 Januari 2026 sebagai upaya untuk memastikan peningkatan kualitas perencanaan dan capaian kinerja di tahun 2026. - Telah

				dilaksanakan Diskusi Penyusunan Perjanjian Kinerja Deputi V pada tanggal 15 Januari 2026 di Ruang Rapat Biro Umum III, Gedung Pos Ibukota Lt. 6, bersama para Asdep guna mereviu kembali konsep Perjanjian Kinerja yang telah disusun. • Telah dilaksanakan dialog kinerja internal Sekretariat Deputi V untuk menyusun Matriks Peran Hasil (MPH) Tahun 2026, sebagai dasar penyusunan SKP Target 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2026 pada tanggal 21 Januari 2026 di Hotel DoubleTree Jakarta, dalam rangka mendukung pencapaian IKU Deputi. • Telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II
--	--	--	--	--

			Tahun 2026 pada tanggal 11 Maret 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta, dirangkaikan dengan kegiatan Agen Perubahan Deputy V.
	2.	Identifikasi dan Pengumpulan data AKIP, Reformasi Birokrasi Kedeputan, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Terlaksana • Telah dilaksanakan kegiatan INTERAK5I Edisi 2: Workshop Penguatan Kapasitas dan Keimanan SDM Deputy V pada tanggal 11 Maret 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta, sebagai bagian dari program Agen Perubahan Deputy V. • Menindaklanjuti Hasil Evaluasi AKIP Eselon I Tahun 2025 dari Inspektorat, telah disampaikan nota dinas nomor PR.04.01/39/D.V. M.EKON.1/01/2026 tanggal 23 Januari 2026 perihal Penyesuaian Revisi Anggaran Berbasis Kinerja sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Deputy V Tahun 2025 kepada para Asdep. • Setiap pengajuan revisi Petunjuk Operasional

				Kegiatan (POK) di lingkungan Deputi V disampaikan melalui nota dinas resmi kepada Kepala Biro Manajemen dan Kerja Sama, dengan menguraikan keterkaitan antara revisi anggaran dengan pencapaian target kinerja setiap unit.
		3.	Persiapan Pelaksanaan Survei Penyelenggaraan Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Terlaksana Telah dilakukan Rapat Internal sebagai persiapan pelaksanaan survei penyelenggaraan tata kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada 18 Maret 2026, sebagai tindak lanjut atas Rapat Penyempurnaan Konsep Manual Indikator Kinerja Utama dan Rencana Aksi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro MKKS pada 16 Maret 2026
		4.	Menyusun matriks SOP layanan Sesdep	Terlaksana Menindaklanjuti nota dinas Plh. Sesmenko Perekonomian nomor OT.03/12/SES.M.E KON/01/2206 tanggal 21 Januari 2026 perihal SOP Koordinasi Data/Informasi Tata Kelola di Lingkungan Deputi, telah dilakukan beberapa hal

				berikut: • Arahan Bapak Plt. Deputi melalui Disposisi Deputi Nomor 148 kepada Sekretaris Deputi untuk menindaklanjuti dan membahas bersama SOP dimaksud. • Melalui nota dinas nomor OT.03/77/D.V.M.E KON.1/02/2026 tanggal 11 Februari 2026 perihal Permohonan Pengesahan SOP Koordinasi Data/Informasi Tata Kelola di Lingkungan Deputi V, Sekretaris Deputi menyampaikan 2 (dua) konsep SOP. • Telah dilaksanakan Sosialisasi SOP terkait Koordinasi Data Informasi Tata Kelola Deputi V kepada seluruh keasdepan di lingkungan Deputi V pada tanggal 3 Maret 2026 di Ruang Rapat Biro Umum V, Gedung Pos Ibukota Lt. 5. • Selain itu, SOP yang telah disahkan juga disampaikan secara tertulis kepada para Asdep melalui nota dinas nomor OT.03/121/D.V.M.
--	--	--	--	---

			EKON.1/03/2026 tanggal 5 Maret 2026 untuk dipedomani oleh seluruh unit kerja.
	5.	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Terlaksana • Telah diusulkan 1 (satu) orang pegawai sebagai Admin SRIKANDI Tahun 2026, yang bertugas untuk melaksanakan manajemen user SRIKANDI di lingkungan Kedeputian 5. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Biro Umum dan SDM melalui nota dinas nomor TU.01.01/21/D.V. M.EKON.1/01/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal Konfirmasi Nama Pengelola Arsip dan Admin SRIKANDI Tahun 2026, dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Biro Umum dan SDM Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2026. • Proses tata kelola persuratan dan penandatanganan naskah dinas oleh pimpinan juga sudah

			dilaksanakan secara berkala melalui SRIKANDI. Hasil evaluasi keaktifan User Aplikasi SRIKANDI disampaikan kepada unit keasdepan melalui nota dinas nomor TU.04/73/D.V.M.E KON.1/02/2026 tanggal 10 Februari 2026, sebagai himbauan kepada seluruh pegawai di lingkungan Deputi V agar aktif membuka dan menggunakan SRIKANDI dalam kegiatan korespondensi internal.
--	--	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat kendala yang berarti, hampir semua rencana aksi dapat berjalan sesuai rencana.

1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Latar Belakang Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Kedeputan. Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen: 1. Rencana Strategis (Renstra) Deputi, paling lambat harus disahkan 5 (lima) bulan setelah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disahkan. Adapun standar penyusunan
--	---

mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

2. Rencana Kerja (Renja), paling lambat harus selesai bulan Juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, paling lambat harus ditetapkan pada akhir Januari tahun berjalan. Adapun standar penyusunan dokumen ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. TOR RAB, paling lambat harus selesai bulan Juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling lambat akhir Februari. Adapun Permenpan Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja tingkat efektivitas perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 sebesar 100%. Target ini dihitung berdasarkan tingkat efektivitas yang diukur melalui dua aspek utama yaitu ketepatan waktu dan substansi dokumen telah sesuai standar. Pada Triwulan I Tahun 2026, tingkat efektivitas perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah terealisasi sebesar 25% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	25%	25 %	100 %

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Hingga Triwulan I 2026, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah menghasilkan **3** dokumen perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2026. Adapun rincian dokumen, target, serta realisasi tercantum sebagai berikut:

Dokumen Perencanaan	Target	Realisasi TW I
Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi	Januari 2026	Ditetapkan pada Januari 2026
TOR RAB TA 2026	Januari 2026	Ditetapkan Januari 2026
Sasaran Kinerja Target Pegawai (SKP)	Januari 2026	Ditetapkan pada Januari 2026

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai penyelesaian dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud komitmen terhadap penguatan akuntabilitas kinerja, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Rencana Aksi Tahun 2026 telah ditandatangani dalam kegiatan penandatanganan yang dilaksanakan secara serentak di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi secara terukur dan akuntabel.
2. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Target (SKP Target) Tahun 2026 telah ditetapkan oleh seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja pada bulan Januari 2026 melalui platform ASN Digital Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dapat diakses melalui www.asndigital.bkn.go.id. Penetapan SKP tersebut merupakan implementasi manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan secara elektronik untuk memastikan keselarasan antara kinerja individu dengan sasaran strategis, target kinerja organisasi, serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
3. Dokumen Rencana Kerja (Renja) serta Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2027 masih dalam proses penyusunan sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027. Sementara itu, TOR dan RAB Tahun 2026 telah ditetapkan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan anggaran pada Tahun Anggaran 2026.

Proses perencanaan telah dilakukan secara kontinyu dimana pada

Triwulan I 2026, Kedeputan V telah mulai menyiapkan dokumen perencanaan untuk tahun 2027. Proses yang berkelanjutan ini menandakan bahwa pada tahun 2027, seluruh dokumen perencanaan diproyeksikan dapat diselesaikan sesuai target.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

No.	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen PK, Manual IKU, dan Renaksi PK	Terlaksana	1. Rapat Evaluasi Perencanaan Kinerja dan Finalisasi Konsep PK Unit Kedeputan Tahun 2026 tanggal 28 Januari 2026 2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II Tahun 2026 tanggal 11 Maret 2026
2.	Pemutakhiran Renstra Deputi V Tahun 2025 – 2029	Tertunda	Pemutakhiran Renstra Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025–2029 belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 karena hasil evaluasi menunjukkan bahwa dokumen Renstra yang berlaku masih relevan dan memadai sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sehingga belum diperlukan pemutakhiran.
3.	Pengusulan Pagu Anggaran TA 2027	Terlaksana	Usulan TOR dan RAB Tahun Anggaran 2027 masih dalam proses penyusunan dan akan diselesaikan sesuai

			dengan tahapan serta jadwal perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
	4. Penyusunan SKP Target 2026	Terlaksana	Penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2027 telah dilaksanakan melalui platform ASN Digital Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dapat diakses melalui www.asndigital.bkn.go.id . Dokumen SKP yang telah ditetapkan menjadi pedoman pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pegawai serta memastikan keselarasan antara target kinerja individu dengan sasaran strategis dan target kinerja organisasi Tahun 2027.
	5. Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Terlaksana	Penyusunan konsep Matriks Manajemen Risiko telah dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi manajemen risiko di lingkungan organisasi. Saat ini, dokumen tersebut sedang dalam proses finalisasi melalui tahapan reviu dan penyempurnaan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan organisasi, profil risiko, serta ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan.
Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya memanfaatkan aplikasi <i>video conference</i> seperti zoom meeting sehingga dapat menghemat anggaran konsumsi rapat sebesar Rp 2.025.000 (untuk 1x rapat dengan asumsi peserta sebanyak 25 orang) untuk setiap kali rapat daring. Selain itu laporan E-monev dibuat secara digital sehingga tidak diperlukan pencetakan bahan/laporan			

	sehingga anggaran untuk melakukan pencetakan bahan/laporan dapat dialihkan sebagian ke akun lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut: 1. Efisiensi anggaran di satu sisi dapat menghemat penggunaan anggaran secara signifikan namun disisi lain juga berakibat pada perubahan secara masif atas rencana kegiatan yang sudah disusun sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran. Akibatnya, unit kerja perlu menyesuaikan rencana kegiatan serta kebutuhan anggarannya. Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Aktif melakukan koordinasi dengan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko Perekonomian dan Unit Kerja Eselon II di Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dalam penyusunan Renstra, Renja, serta TOR dan RAB 2027.
--	---

1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Latar Belakang Persentase keberhasilan tingkat ketaatan pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian penciptaan budaya kerja yang transparans dan akuntabel melalui pelaporan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang diberikan oleh unit pengampu. Nilai keberhasilan tingkat ketaatan pelaporan diperoleh berdasarkan perhitungan total laporan yang memenuhi standar ketaatan dibagi total laporan yang disusun dan kemudian dikalikan 100%: Hasil Pengukuran Kinerja Target kinerja tingkat ketaatan pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 sebesar 100%. Ketaatan ini dinilai berdasarkan 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu. Pada Triwulan I Tahun 2026, tingkat ketaatan pelaporan Deputi Bidang
---	--

Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah terealisasi sebesar 25% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	25%	25%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan

	1.	Penyusunan LAKIP Tahun 2025	Terlaksana	• Telah disusun LAKIP Tahun 2025 • Penyampaian Nota Dinas Nomor: AK.03.02/25/D.V .M.EKON/02/2026 Perihal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi V Tahun 2025 • Undangan Rapat Nomor: AK.03.01/63/D.V .M.EKON.1/02/2026 Perihal Penyusunan Konsep LAKIP Deputi V Tahun 2025 • ND Nomor: AK.01/09/D.V.M. EKON.1/01/2026 Perihal Laporan Hasil Rapat Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2025
	2.	Pengelolaan Laporan Kinerja melalui EKON-GO	Terlaksana	• Telah dilaksanakan pelaporan Kinerja TW I
	3.	Penyusunan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2025	Terlaksana	• Telah disampaikan Nota Dinas Penilaian Kinerja ASN Tahun 2025 dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026
	4.	Pengisian e Monev TW I	Terlaksana	Pengisian e-Monev Triwulan I telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan

			yang berlaku sebagai bentuk pelaporan capaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada periode Triwulan I.
	5.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran TW I	Terlaksana • ND Revisi POK Bulan Januari 2026 • ND Revisi POK Bulan Februari 2026 • ND Nomor: PR.02.01/74/D.V .M.EKON.1/02/2026 Perihal Permohonan Penyampaian usulan Kegiatan dan Besarannya, termasuk TOR dan RAB terkait Kegiatan Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah telah menyusun format pelaporan kinerja yang akan diunggah pada TW I 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Dinamika kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada perubahan rencana kegiatan dan penyesuaian kebutuhan anggaran di setiap unit kerja.
2. Terdapat tantangan dalam sinkronisasi waktu perolehan data capaian dari kementerian/lembaga teknis di bawah koordinasi Deputi V, mengingat format dan waktu pelaporan internal instansi tersebut kerap bervariasi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan timeline pengumpulan dokumen internal (seperti TOR, RAB, dan dokumen pendukung) lebih awal (H-7 sebelum batas waktu unit pengampu) guna menyisakan ruang waktu

	evaluasi dan reviu kualitas dokumen substansi. 2. Mengoptimalkan koordinasi internal guna mendorong kepatuhan dokumen berdasarkan standar EKON-GO dan e-Monev guna meminimalisasi kesalahan format pengiriman balik. 3. Mengoptimalkan <i>tracking</i> sirkulasi Nota Dinas (ND) baik undangan, laporan hasil rapat, maupun revisi POK secara digital agar rantai birokrasi pelaporan terdokumentasi dengan rapi dan mudah diakses saat penyusunan LAKIP periodik.
--	--

1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi	Latar Belakang Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputi untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputi. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputi bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus kedeputan. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata pada tahun ini mengawal isu – isu strategis kedeputan yang meliputi : 1. Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka 2. Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil 3. Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan 4. Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis 5. Pengembangan Pariwisata Adapun kriteria isu-isu strategis selesai apabila apabila : (1) Isu Strategis telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait; (2) Hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Kedeputan; dan (3) Dokumen penyelesaian dari isu – isu strategis tersedia serta terverifikasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian isu-isu strategis adalah sebagai berikut: $\frac{\text{Total Isu – Isu Strategis yang diselesaikan}}{\text{Total Isu Strategis yang ditetapkan}} \times 100\%$ $(\text{Total Isu – Isu Strategis yang Diselesaikan})/(\text{Total Isu Strategis yang ditetapkan}) \times 100\%$ Hasil Pengukuran Kinerja Target kinerja Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan
--	--

oleh Deputi pada tahun 2025 sebesar 100%.

Sampai dengan laporan ini disusun, persentase penyelesaian isu strategis dinilai berdasarkan monitoring terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh ke deputian V untuk mencapai target dalam RPJMN. Monitoring dilakukan terhadap kegiatan yang terkait dengan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional, dan Kunjungan Wisatawan Mancanegara. Hasil monitoring kemudian disampaikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi telah terealisasi sebesar 25% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi	Persentase (%)	100%	25%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi			
No.	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan kegiatan relevan terkait isu strategis yang ditugaskan oleh Deputi TW I	Terlaksana	• Koordinasi Pengembangan Dashboard Sistem Informasi Ketenagakerja • Terlibat dalam diskusi Program Peningkatan Aksesibilitas,

			Konektivitas Dan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2026 • Terlibat dalam Rapat Penyusunan Program Pelatihan Welder dan Hospitality • Terlibat dalam Diskusi Program dan Isu Strategis Industri Kulit dan Alas Kaki Tahun 2026
	2.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian Isu Strategis TW I	Terlaksana • Rapat koordinasi Internal Deputi V yang membahas perkembangan dan isu industri, ketenagakerjaan , dan pariwisata secara berkala • Koordinasi tindak lanjut aduan pada <i>debottlenecking</i> Satgas P2SP • Terlibat dalam Evaluasi Monitoring Penyaluran Bantuan Hari Raya bagi Pengemudi Transportasi Online 2025 • Terlibat dalam Monitoring dan Diskusi Kondisi Industri Tekstil dan Produk Tekstil
Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah monitoring penyelesaian isu strategis yang ditangani pada setiap Keasdepan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan laporan			

	monitoring yang lebih komprehensif secara berkala setiap bulan. Pelaksanaan rencana aksi selama Triwulan I Tahun 2026 telah memperhatikan prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya guna mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu bentuk implementasi efisiensi tersebut adalah optimalisasi penggunaan dokumen digital sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan dan distribusi dokumen di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Efisiensi yang dihasilkan dari pelaksanaan rencana aksi tersebut selanjutnya dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Rapat Internal Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dengan nilai efisiensi sebesar Rp5.000.000. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah meningkatkan intensitas rapat untuk menindaklanjuti hasil monitoring.
--	---

1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Latar Belakang Pembangunan zona integritas merupakan salah satu agenda nasional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani. Bagi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, keberhasilan implementasi zona integritas menjadi salah satu pendukung dalam mendukung tercapainya sasaran strategis, khususnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Persentase pembangunan zona integritas diukur melalui pemenuhan dokumen pendukung reformasi birokrasi yang sesuai standar, yang mencakup aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil Pengukuran Kinerja Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% penetapan target pada tahun 2026 didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Pada Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah terealisasi sebesar 25% dari target Tahun 2026 sebesar 75% dengan ringkasan sebagai berikut.
---	---

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata TW I	Persentase (%)	25%	25%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada Workshop Penguatan Kapasitas dan Keimanan SDM Deputi V: "Akselerasi Analisis Data, Overview Sistematis Produk Kebijakan, dan Wawasan Jenjang Karir pada tanggal 11 Maret 2026 sesuai dengan Laporan Nota Dinas Nomor:

			KP.07.06/174/D.V. M.EKON.1/03/202, tanggal 31 Maret 2026
	2	Penandatanganan Pakta Integritas	Terlaksana Dokumen PK, Manual IKU, dan Rencana Aksi telah ditandatangani oleh seluruh pimpinan unit kerja di Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada 11 Maret 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 merupakan kelanjutan dari program-program yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya. Melalui agenda Sosialisasi serta Penandatanganan Pakta Integritas di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, terlihat jelas dedikasi jajaran pimpinan dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas. Upaya ini dirancang demi membangun suasana kerja yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta moralitas, yang pada akhirnya akan memperkuat kredibilitas instansi di mata masyarakat. Lewat langkah strategis tersebut, seluruh komponen organisasi diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam mengakselerasi proses reformasi birokrasi yang lebih berkualitas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I di tahun 2026, unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata masih menghadapi beragam kendala dalam mencapai target pembentukan Zona Integritas. Salah satu masalah krusial yang ditemukan adalah adanya sejumlah pegawai yang belum menyelesaikan kewajiban laporan pajak tahunan lantaran gangguan teknis pada proses migrasi sistem perpajakan. Guna mengatasi hal tersebut, upaya pendampingan mendalam dalam bentuk coaching clinic akan segera diselenggarakan untuk membimbing staf dalam menyelesaikan pelaporan pajak mereka. Dengan diterapkannya strategi ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih inklusif, produktif, dan berintegritas tinggi, yang pada akhirnya akan mendongkrak kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata serta memberikan hasil yang lebih maksimal bagi *seluruh pemangku kepentingan*.

**1.7 Indeks Kepuasan
Layanan Sekretaris
Deputi Bidang Koordinasi
Industri,
Ketenagakerjaan, dan
Pariwisata**

Latar Belakang

Indikator kepuasan layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sekretaris Deputi kepada Kedeputan untuk melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, serta sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Deputi.

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu:

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja berupa indeks kepuasan layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 adalah nilai 3 dari 4 yang berarti memuaskan.

Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu: (i) Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*); (ii) Aspek Keandalan dalam layanan (*Reliability*); (iii) Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*); (iv) Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*); dan (v) Aspek Sikap dalam Layanan (*Empathy*). Seluruh aspek kepuasan tersebut dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu : (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

Pada Triwulan I Tahun 2026, nilai indeks kepuasan layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata belum dapat diukur karena survey belum dilakukan dan baru dalam tahap persiapan dan penyusunan komponen survey dan responden:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagake rjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	3 dari 4	-	-
---	-------------------	----------	---	---

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Pelayanan Kegiatan Deputi	Terlaksana	1. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026 2. Rapat Internal/<i>Brief</i> Mingguan rutin dengan Plt. Deputi
2.	Koordinasi kegiatan ke sekretariat Deputi V	Terlaksana	1. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan,

			dan Pariwisata Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026 2. Rapat Evaluasi Perencanaan Kinerja dan Finalisasi Konsep PK Unit Kedeputian Tahun 2026 tanggal 28 Januari 2026 3. Pelatihan Penguatan Manajemen Risiko tanggal 13 Maret 2026 4. Rapat Penyempurnaan Konsep Manual Indikator Kinerja Utama dan Rencana Aksi Tahun 2026 tanggal 16 Maret 2026
	3.	Persiapan Survei Kepuasan Layanan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Terlaksana Penyiapan survei telah dilakukan melalui penyusunan daftar pertanyaan survei dan penentuan responden Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan *benchmarking* secara informal dengan unit kedeputian lain mengenai layanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi pada masing- masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya memanfaatkan aplikasi *video conference* seperti zoom meeting sehingga dapat menghemat anggaran konsumsi rapat sebesar

	Rp 2.025.000 (untuk 1x rapat dengan asumsi peserta sebanyak 25 orang). Selain itu, survei dibuat dalam bentuk <i>google form</i> sebagai efisiensi, sehingga tidak diperlukan pencetakan bahan dan anggaran untuk melakukan pencetakan bahan dapat dialihkan sebagian ke akun lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tetap disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai serta memastikan pelaksanaan survei layanan dapat terlaksana sesuai jadwal yang sudah direncanakan.
--	---

Jakarta, 6 April 2026

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata



Nuryani Yunus